

**POTENSI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG SOTA,
DISTRIK SOTA, KABUPATEN MERAUKE**

Hendricus Lembang

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Musamus Merauke

Email : hendricuslembang@unmus.ac.id

ABSTRACT

Base on the Village Law No. 6 of 2014 concerning Village, namely villages have the right, authority and obligation to regulate and manage their own government affairs and community interests based on their rights of origin and local customs. In this authority, the village provides services to the community and conducts community empowerment. Sota village is a border region with Papua New Guinea. The location of Kampung Sota is relatively close to the seafront of the city of Merauke, has a population of 1,270 in 2014 and the resources of forests, rivers and swamps. This research use *Participatory Rural Appraisal* (PRA) approach and SWOT analysis. The results of the study found: Strength Aspects namely 1). Raw materials are easily available, 2). Strategic business location, 3). Product prices begin to increase, 4). The products produced are export products, 5). Availability of Village Land, 6). Commitment from the village government. Weakness aspects are: 1). The lack of business capital, small production quantity, 2). Transportation for raw materials, 3). Unattractive packaging, 4). Cooperatives in the village are controlled by individuals / traditional leaders who control the local land. Opportunity Aspect namely 1). Products that have a prospective market share, 2). Production capacity can be reproduced, 3). Increased consumer needs and public awareness to use local products, 4). Development of technology and information, 5). Additional workforce. Threat aspects, namely: 1). Still depends on the rainy and dry seasons, 2). Increased bargaining position of raw material suppliers, 3). The emergence of new competitors, 4). Government regulations on National Parks. So that the type of potential business that can be developed is the management of eucalyptus oil. While the alternative business sector is tourism, clean water, nine basic commodities and arwana fish.

Keywords: *Development, Village Owned Enterprises, prospective*

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa atau kampung telah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. [1] Dalam kewenangan tersebut, kampung melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pemberdayaan masyarakat. [2] Sejumlah kewenangan yang diberikan diikuti dengan transfer dana dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Kampung (ADK) dari kabupaten. Sehingga diharapkan kampung dapat mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan kampung dapat membentuk kelembagaan ekonomi di tingkat kampung atau BUMDes/BUMK untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada. [3] Manfaat dari pendirian BUMK dapat digunakan untuk pengembangan usaha serta pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. [4] BUMK merupakan kelembagaan ekonomi di tingkat kampung, memiliki badan hukum dan bergerak di dalam bidang usaha untuk memberikan kemudahan akses terutama distribusi barang dan jasa serta memudahkan warga untuk memasarkan produksi dan komoditasnya [5]. Sehingga mampu memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan untuk menjadi motor penggerak ekonomi di kampung. Sebab selama ini kampung banyak memiliki berbagai permasalahan ekonomi seperti rendahnya penguasaan lahan produktif oleh masyarakat lokal dan skala usaha yang relatif kecil bahkan cenderung subsisten, akses pendanaan yang terbatas dan cenderung berpola 'ijon atau menggunakan jasa rentinir, kurang memiliki akses pasar dan distribusi hasil komoditi dan nilai tawar yang rendah; kurang memiliki pengetahuan mengenai cara produksi yang baik; sarana dan prasarana belum mendukung *input* produksi, proses produksi dan pasca produksi.

Selain itu pula ada faktor-faktor utama lambatnya pergerakan ekonomi di tingkat kampung Sota dikarenakan kualitas sumber daya manusia rendah, fasilitas infrastruktur publik yang sangat minim, struktur perekonomian kampung hanya mengandalkan sektor primer sehingga tidak variatif kegiatan-kegiatan ekonomi produktif kampung, lembaga-lembaga baik keuangan/ekonomi maupun sosial sangat minim di kampung. Minimnya akses pasar sebagai tempat penyaluran barang dan juga pemenuhan kebutuhan membuat masyarakat di kampung tersebut terkesan terisolasi dalam mendapatkan aksesibilitas layanan publik bidang ekonomi. Harga kebutuhan hidup yang mahal tidak sebanding dengan sumber pendapatan, sehingga masyarakat di kampung hidup dengan pola sistem ekonomi konsumtif.

Sementara Kampung Sota memiliki kekayaan alam yang berpotensi untuk dikembangkan, seperti ikan, hasil hutan, perkebunan serta potensi pariwisata. Karena itu, perlu kenaikan pendapatan per kapita dapat menaikkan standar hidup riil masyarakat apabila pendapatan per kapita meningkat.[6] Sisi lain kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo, dalam Nawacita yang ketiga, yakni; “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Maka pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa (DD) yang cukup besar bagi pembangunan di desa/kampung. Serta didukung dengan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari APBD Kabupaten Merauke. Ketersediaan sumber daya alam yang didukung dengan ketersediaan anggaran yang besar di kampung (APBK), juga belum mampu mendorong ekonomi masyarakat kampung.

Demikian pula, komitmen Pemerintah Kabupaten Merauke untuk memajukan daerah dengan memacu pertumbuhan ekonomi terutama dari kampung-kampung dengan beberapa paket program unggulan, di antaranya Program Membangun Semua Kampungku (BANGSAKU). Dengan filosofi “tangkap, tanam dan pelihara” diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi masyarakat di kampung-kampung. Kemajuan ekonomi sebuah daerah kabupaten dapat tercapai karena adanya kontribusi dari aktivitas ekonomi di kampung-kampung. Salah satu misi pemerintah adalah membangun kampung untuk menstimulasi dan menggerakkan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha. Ketersediaan sarana dan fasilitas publik sangat mendukung percepatan pembangunan, memperkuat institusi ekonomi terutama untuk mendukung mata rantai produksi dan pemasaran serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai dasar pertumbuhan ekonomi kampung. Selain itu, ada kekuatan modal sosial masyarakat kampung yang terdiri dari ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*) dan jaringan sosial (*social linking*). [7]

Komitmen ini sangat ditekankan dalam upaya membangun dari kampung (desa) ke kota. Slogan pembangunan daerah Kabupaten Merauke yaitu “Membangun Kampung dan Kampung Membangun”. Sehingga partisipasi masyarakat yang semakin besar akan berperan aktif di dalam pembangunan daerah. Perhatian pemerintah baik Pusat maupun Daerah Kabupaten Merauke untuk membangun kampung semakin meningkat seperti bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang setiap tahun untuk meningkatkan stimulus agar kampung mampu berkembang secara mandiri. Begitupula daerah memberikan bantuan melalui berbagai program termasuk Program Bangsaku (Bangun Seluruh Kampung).

Bahkan upaya pemerintah untuk mendorong dan membuka ruang bagi masyarakat kampung dalam usaha membentuk badan usaha. Badan usaha ini akan dapat menjadi motor penggerak ekonomi kampung dan memberdayakan masyarakat kampung sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik. BUMK dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Sehingga BUMK akan menjadi lembaga ekonomi di tingkat kampung yang dapat menopang program BANGSAKU. selaras dengan program pemerintah daerah.

Pendirian dan pengembangan BUMK sebagai upaya konsolidasi perekonomian kampung dengan berorientasi pada kebutuhan dan potensi kampung serta memprioritaskan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pemenuhan pasokan barang pokok masyarakat, fasilitas pemenuhan hajat hidup (sarana air bersih, sarana komunikasi) agar masyarakat memiliki aksesibilitas yang baik dan tingkat mobilitas untuk interaksi dengan luar kampung. Oleh karena itu, BUMK merupakan usaha milik kampung yang dikelola secara otonom oleh warga kampung, di mana keuntungan usaha BUMK sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pelayanan sosial kampung dan mendukung perkembangan BUMK tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Desain penelitian tentang pemetaan potensi dan pemilihan bidang usaha di Kampung Sota. Kajian ini dengan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) [8] yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata.

Metode pendekatan ini juga digunakan untuk memahami desa/kampung secara partisipatif, dalam hal permasalahan dan upayaantisipasi yang dibutuhkan, dengan mendasarkan pada potensi dan kendala sumber daya yang tersedia. Karena PRA adalah suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Chambers menyatakan pada intinya PRA adalah merupakan pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta membuat rencana dan tindakan secara partisipatif (Djohani, Rianingsih, 1996).

Dengan menggunakan metode PRA maka para fasilitator mampu beradaptasi dan fleksible mengembangkan teknik PRA dengan kondisi-kondisi riil di kampung tersebut. Karena teknik ini bertujuan untuk pengembangan program bersama masyarakat. Dengan demikian proses pembentukan kelembagaan ekonomi di kampung melalui BUMK tentu saja mengacu pada kajian pemetaan potensi dan pemilihan bidang usaha di kampung tersebut.

Teknik PRA yang akan digunakan untuk untuk melakukan kajian pemetaan potensi dan pemilihan bidang usaha antara lain: (1) Pemetaan: Geografis, Demografis, Penyebaran Etnis, Sosial Ekonomi, Aksesibilitas, sarana dan prasarana, pasar, kelembagaan pemerintah, kelembagaan komunitas adat, *agent of changes* (tingkat pendidikan SMP ke atas). (2) Potensi Wilayah/SDA: Aksesibilitas (infrastruktur jalan, telekomunikasi, energi listrik), Pasar, Modal, SDM, Regulasi. (3) Komitmen para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*): Pemerintah daerah Kabupaten dan

distrik, Pemerintah kampung, Pihak swasta, Masyarakat, dan. (4) Peluang dan ancaman serta Kelemahan dan kekuatan dilakukan dengan pendekatan Analisis SWOT, yang kemudian menjadi bahan rekomendasi.

C. PEMBAHASAN

Kemudahan Aksesibilitas

Kampung Sota memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai yang berada di perbatasan negara Papua New Guinea (PNG). Aset Prasarana umum seperti Jalan Kabupaten sepanjang 16 Km dan jalan kampung sepanjang 15 Km. Kampung Sota memiliki sarana pelayanan kesehatan yaitu telah tersedia 1(satu) unit Puskesmas Pembantu (pustu) yang sudah beroperasi. Ada 3 rumah ibadah yaitu 2 buah gereja (Gereja Katolik dan Gereja Protestan) dan 1 buah mesjid. Aset pemerintah beberapa tugu monumen bersejarah dan tugu kilometer nol yang merupakan aset untuk pengembangan kawasan destinasi wisata.

Sedangkan untuk sekolah ada 3 yaitu 1 TK PAUD, 1 sekolah dasar YPPK dan 1 SMK Negeri Sota. Sedangkan ketersediaan listrik sudah berfungsi melayani masyarakat 1 kali 24 jam. Sarana air bersih yang dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga bersumber dari sumur-sumur warga. Di Kampung Sota merupakan salah satu sumber air bersih yang dapat diminum bahkan sebagai salah satu tempat suplai air minum untuk Kabupaten Merauke. Di Kampung Sota juga terdapat 2 buah bank yaitu Bank BRI dan Bank Papua.

Selain itu pula ada lembaga/badan keamanan di Kampung Sota seperti Kantor Polisi dan Kantor TNI Angkatan Darat yang berkerja di daerah perbatasan. Lembaga keamanan ini akan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban serta akan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pasar

Pasar merupakan salah satu aspek penting di dalam mempertimbangkan suatu usaha ekonomi yang dapat memungkinkan untuk menjual hasil-hasil produksi baik berupa barang maupun jasa. Di Kampung Sota terdapat beberapa pelaku bisnis usaha para pendatang yang berjejer di sepanjang jalan Trans Papua menjanjkan makanan dan minuman serta barang campuran lainnya seperti seperti rumah makan dan kios kelontongan. Sementara di dalam daerah perbatasan ada kios yang menjual barang-barang dagangan dan souvenir seperti hasil kerajinan kas Papua. Letak kampung ini cukup terbuka dengan kampung-kampung lainnya yang berada di sekitarnya seperti Kampung Yanggandur dan Kampung Erambu di Distrik Sota serta Kampung di Distrik Morehead di negara PNG serta merupakan jalan poros dari Kota Merauke ke Kabupaten Boven Digoel. Sehingga, letak Kampung ini relatif cukup dekat dengan pusat kota Merauke apabila dibandingkan dengan kampung-kampung lainnya di Kabupaten Merauke.

Dari aspek jumlah penduduk Kampung Sota yaitu berpenduduk sebanyak 1.270 jiwa tahun 2014. Jumlah penduduk cukup besar untuk ukuran sebuah kampung di Kabupaten Merauke sehingga menjadi potensi pasar secara internal. Selain itu, Kampung Sota memiliki cukup aksesibilitas yang dapat dijangkau baik darat sampai Kota Merauke dan juga kampung-kampung ataupun daerah yang berbatasan dengan apua New Guinea (PNG) yang menjadi salah satu pusat destinasi kunjungan wisata bagi setiap orang yang datang berkunjung ke Merauke. Sedangkan Distrik Merauke tetap menjadi salah satu target segmen pasar paling potensial karena memiliki jumlah penduduk yaitu sebesar 98.478 jiwa pada tahun 2016.(BPS Merauke Dalam Angka 2017). Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam di distrik ini menjadi potensi pasar untuk komoditi hasil-hasil dari Kampung Sota.

Sumber Daya Manusia

Komposisi tenaga kerja Kampung Sota berdasarkan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1

Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk	Jumlah	Satuan
1.	Lulusan S-1 keatas	40	Orang
2.	Lulusan SLTA	19	orang
3.	Lulusan SMP	3	orang
4.	Lulusan SD	200	orang
5.	Tidak Tamat SD/tidak sekolah	300	orang

Sumber : RPJM Kampung Sota

Tingkat pendidikan lulusan Strata Satu ke atas mencapai 1,62%, lulusan SLTA mencapai 17,17%. Untuk warga masyarakat Kampung Sota yang lulus SMP mencapai 11,37%, sedangkan yang lulus SD mencapai 31,56% dan yang tidak lulus SD/tidak sekolah mencapai 38,28%. Tingkat prosentase masyarakat Kampung Sota yang tidak tamat SD/tidak sekolah dihitung termasuk anak-anak yang masih bersekolah di SD. Tingkat pendidikan masyarakat ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Sota.

Modal

Modal merupakan salah satu faktor produksi dan menjadi sumber daya yang akan menentukan kegiatan usaha berhasil. Besarnya modal akan memungkinkan pula aktivitas usaha akan dapat bergerak lebih besar pula dan peluang untuk mendapatkan laba/profit pun besar. Untuk masing-masing modal dari kelima kampung tersebut dapat dilihat besarnya dana yang terdiri atas dana desa (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), ADK silfa serta dana BANGSAKU yang dikelola oleh pemerintah kampung dalam satu tahun. Berikut ini potensi modal untuk mengelola

BUMK sebagai lembaga ekonomi milik kampung dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
**Rekapitulasi DD, ADK dan Dana BANGSAKU
 Silfa 2016 dan Murni 2017 di Kampung Sota**

No.	Jenis Dana Kampung (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	DD+ADK Silfa 2016	DD : 273.208.000,- ADK : 430.487.370,-
2.	DD 2017	806.651.416,26,-
3.	ADK 2017	695.898.653,61,-
4.	Dana Bangsaku (2017)	98.053.453,62,-
	Total	2.304.298.893

Sumber : Hasil Wawancara dan Data diolah 2017.

Regulasi

Regulasi merupakan produk hasil kebijakan pemerintah baik pusat, daerah maupun kampung yang dapat berupa keputusan aturan hukum yang mengikat. Hasil kebijakan ini akan memberikan suatu jaminan kepastian hukum dalam menata, mengelola dan mengadakan kerjasama agar kegiatan usaha dapat berjalan sinergis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Produk kebijakan ini akan menjadi landasan pedoman legal yang kuat dalam aspek operasional maupun teknis bagi lembaga pemberdayaan ekonomi kerakyatan di tingkat kampung. Lembaga ekonomi yang dimaksudkan yaitu Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes atau nama lainnya yaitu Badan Usaha Miliki Kampung (BUMK).

Pemahaman tentang keberadaan lembaga swadaya masyarakat di bidang ekonomi belum banyak diseminasi ke seluruh kampung bahkan sampai saat ini belum ada BUMK berjalan dengan baik di Kabupaten Merauke. Hal ini disebabkan karena aturan mengenai BUMK masih pada level pemerintah pusat dan di tingkat kementerian yang dituangkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah/menteri yang masih bersifat umum. Namun untuk lebih dekat sebagai panduan masyarakat kampung dan disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan kekhasan daerah maka diperlukan aturan pada level pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan kampung.

Secara yuridis formal, BUMK telah memiliki landasan hukum yang kuat yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah hingga peraturan menteri. Namun untuk operasional yang lebih teknis sesuai dengan kebutuhan, potensi dan kekhasan daerah maka sebelum dibentuk BUMK harus lebih dahulu diperkuat dengan peraturan pemerintah daerah dalam bentuk peraturan bupati (perbup) ataupun peraturan daerah (perda) dan pada tingkat kampung akan diatur dengan peraturan kampung (perkam).

Jenis Usaha

Jenis Usaha yang akan dikembangkan atau akan dilaksanakan dapat dilihat dari komposisi persentase aktivitas mata pencaharian penduduk di masing-masing kampung untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat kampung.

Kampung Sota dengan mata pencarian penduduk lokal adalah berkebun, berburu, menjaring, dan bertani. Mereka umumnya masih bergantung kepada alam. Sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian 178 KK, Selain bertani keluarga yang mempunyai penghasilan dari perdagangan besar/eceran dan kerajinan sebanyak 61 kepala keluarga, untuk jasa angkutan terdapat 21 kepala keluarga, yang melakukan usaha dan untuk jasa yang terdiri dari guru dan tukang berjumlah 30 orang. Sebagaimana diuraikan di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3
Sumber Penghasilan Utama Penduduk Sota

No.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk	Jumlah	Satuan
1.	Pertanian, perkebunan	178	keluarga
2.	Pertambangan dan penggalian		orang
3.	Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		Kelompok
4.	Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	61	Keluarga
5.	Angkutan	21	Keluarga
6.	Jasa		

Sumber : RPJM Kampung Sota

Potensi Ekonomi Kampung Sota

Kampung Sota memiliki potensi sumber daya alam sebagaimana di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Sumber Daya Alam Kampung Sota

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Lahan karet	8	Ha
2.	Lahan yang belum diolah	180	Ha
3.	Lahan tanah timbun	80	m ³
4.	Hutan	100	Ha
5.	Sungai	5000	Ha
6.	Rawa	10	m
7.	Dusun sagu	2	Ha

Sumber : Dokumen RPJM Kampung Sota

Tabel 4 di atas menunjukkan lahan yang belum diolah sama besar dengan hutan karena masyarakat Kampung Sota lebih bergantung pada alam untuk sumber kehidupannya. Luas lahan yang belum di olah lebih tepat digunakan untuk perkebunan seluas 180 ha. Lahan yang belum diolah adalah lahan yang terdiri dari hutan dan direncanakan akan digunakan sebagai lahan perkebunan.

Kampung Sota terdapat satu aliran sungai atau kali yang melintasi kampung yang panjang kurang lebih 5000 dan rawa di kampung seluas 10 Ha. Potensi sumber daya alam ini terutama tanah timbul telah digunakan untuk pelaksanaan pembangunan kampung salah satunya adalah penimbunan jalan masuk kampung.

Hasil Analisa SWOT

Analisa dengan melihat faktor internal yang bisa menjadi kekuatan (*strengths*) maupun kelemahan (*weakness*) serta faktor internal yang juga bisa menjadi peluang (*opportunities*) maupun juga dapat menjadi ancaman (*threats*). Metode analisa SWOT ini digunakan pada potensi jenis usaha utama (*core business*) yaitu usaha pengelolaan Minyak Kayu Putih yang akan dikembangkan di kampung tersebut. Sedangkan potensi usaha lainnya tidak dilakukan metode analisa SWOT namun tetap menjadi alternatif jenis usaha penunjang dalam usaha yang dapat dikelola oleh BUMK nantinya.

Tabel 5

Analisa SWOT Pengelolaan Minyak Kayu Putih di Kampung Sota

No	Faktor Internal	No	Faktor Eksternal
1.	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	2.	Peluang (<i>Opportunities</i>)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan baku mudah didapatkan b. Lokasi usaha yang strategis karena dekat dengan bahan baku c. Harga produk mulai mengalami peningkatan d. Produk yang dihasilkan merupakan produk ekspor e. Proses produksi menggunakan teknologi sederhana f. Tersedianya Tanah Bengkulu (Tanah Kas Desa) g. Komitmen dari kampung tentang Bumdes 		<ul style="list-style-type: none"> a. Produk memiliki pangsa pasar yang bagus b. Kapasitas produk diperbanyak c. Meningkatnya kebutuhan konsumen dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk local. d. Adanya perkembangan teknologi dan komunikasi. e. Penambahan tenaga kerja
3.	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	4.	Ancaman (<i>Threats</i>)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya modal usaha. b. Kuantitas produksi kecil. c. Transportasi 		<ul style="list-style-type: none"> a. Masih tergantung pada musim hujan dan kemarau b. Meningkatnya posisi tawar pemasok bahan baku

-
- | | |
|---|--|
| pengangkutan bahan baku. | c. Munculnya pesaing dikemudian hari. |
| d. Kemasan kurang menarik. | d. Regulasi pemerintah tentang Taman Nasional. |
| e. Koperasi dikuasai oleh pribadi/tokoh yang menguasai tanah setempat | |

Berdasarkan hasil analisa SWOT diatas pada bidang usaha Minyak Kayu putih, namun alternatif usaha lainnya yang cukup potensial dikembangkan sebagai usaha penunjang BUMK seperti:

- Potensi Ikan Arwana
- Air Bersih
- Sembako (distributor sembilan bahan pokok masyarakat kampung)
- Pariwisata (retribusi pengunjung, *money changer*, penjualan souvenir kerajinan khas Papua).
- Penyewaan Lahan Kampung.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Potensi ekonomi yang dimiliki Kampung Sota seperti: pengembangan pariwisata, kehutanan dan perkebunan.
2. Jenis usaha utama yang berpotensi untuk dikelola oleh BUMK di Kampung Sota yaitu pengolahan minyak kayu putih.
3. Seluruh Pemerintahan dan masyarakat Kampung Sota sangat antusias dan berkomitmen mendukung terbentuknya BUMK secepatnya.

Saran-Saran

1. Diharapkan segera membahas penyusunan Peraturan Kampung tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran BUMK di 5 kampung yang memiliki potensi BUMK didirikan.
2. Sosialisasi tentang pentingnya BUMK, pendidikan dan pelatihan tenaga teknis secara berkesinambungan untuk meningkatkan SDM di kampung-kampung yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten.
3. Rendemen minyak kayu putih perlu diperhatikan bahan baku dan teknologi penyulingan agar usaha pembuatan minyak kayu putih layak usaha.
4. Perlunya pelatihan dan pendampingan dari berbagai stakeholder guna meningkatkan dan berkelanjutan penyulingan minyak kayu putih.
5. Peningkatan produktivitas dan kualitas minyak kayu putih agar keuntungan dapat ditingkatkan.

6. Hasil studi pemetaan potensi kelayakan usaha ini untuk dikembangkan perlu dimusyawarakan bersama antar warga masyarakat kampung bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 2014.
- [2] Z. Ridwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *J. Ilmu Huk.*, vol. Volume 7 N, 2013.
- [3] U. B. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2007.
- [4] M. R. R. S. Anggraeni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan, Studi pada BumDes di Gunung Kidul," *J. MODUS*, vol. Vol.28 (2), 2016.
- [5] S. Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa(Studi di Desa Landungsari, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang)," *J. Adm. Publik*, vol. Vol. 1, No, 2012.
- [6] M. . Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Cetakan ke. Jakarta: PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- [7] M. Rosalisa, "Modal Sosial dan Budaya dalam Pembangunan Desa," *J. Ilmu Budaya*, vol. Vol. 13 No, 2016.
- [8] H. dan A. K. H. Sanusi, "Pengkajian Potensi Desa dengan Pendekatan Partisipatif di Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur," *J. AGRIFOR*, vol. Volume XIV, 2015.